

# **Benang Kusut Tata Kelola Sektor Ekstraktif: Persoalan Struktur atau Agen?**

Yustinus Prastowo

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

---

# Problem Empirik

- Kontribusi penerimaan sektor SDA cukup besar, namun kebocoran masih cukup tinggi.
  - Persoalan administrasi menjadi penyebab utama kebocoran penerimaan sektor SDA.
  - Koordinasi antarlembaga sangat buruk sehingga menimbulkan distorsi dan menyebabkan ketiadaan kontrol yang baik.
  - Persepsi pengusaha terhadap tata kelola sektor ekstraktif menunjukkan data yang belum menggembirakan.
  - Tumpang tindih kebijakan dan aturan antardaerah, antara pusat dan daerah menjadi penyebab utama.
-



# Status Problematik

- Selama ini penelitian dan resep perbaikan tata kelola (termasuk sektor ekstraktif) berfokus pada menjawab pertanyaan “bagaimana”.
- Jika problemnya adalah tata kelola, lalu siapa yang menjadi subjek dan objek “tata kelola”?
- Introduksi ide “governance” (tata kelola), mengikuti structural adjustment pasca krisis welfare state dan berkembangnya ideologi “pasar bebas”.
- Jejak yang ditinggalkan adalah pertanyaan → siapa subjek? (decentered subject). Apakah ide “government” masih relevan?
- Sejauh mana persoalan “tata kelola” tak melibatkan pengusaha, pejabat, aparatur, calo, sekaligus warga(negara)?
- Sejauh mana persoalan “tata kelola” ini telah mengakomodasi partisipasi warga sebagai representasi subjek berdaulat, yang memilih government untuk menjalankan “tata kelola”?



# Tanggapan terhadap BKF

- Identifikasi persoalan cukup bagus karena mampu merekonstruksi problem administrasi dengan baik dan utuh.
- Merekomendasikan usulan yang praktis – baik non kelembagaan maupun kelembagaan – yang cukup realistis untuk diwujudkan segera.
- Perijinan menjadi pengait (nexus) dari perbaikan tata kelola.
- Bias subjek → berbicara tata kelola (bagaimana) tidak mungkin mengabaikan “siapa”. Relasi “power-property” tidak boleh diasumsikan netral.
- Belum menyentuh dimensi “mengapa” → mengapa perilaku pengusaha dan penguasa seperti itu, bukan sebaliknya?
- Intervensi kelembagaan menuntut transformasi kelembagaan Ditjen Pajak → bagaimana formulasi dan implementasinya?
- Perbaikan tata kelola mengandaikan perubahan kebijakan radikal, bukan tambal sulam → hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin yang berdaulat dan didukung publik.
- Konstruksi etis → mengemplang pajak (dan PNPB) adalah kejahatan ~~melawan kepentingan publik. Lalu siapa penanggungjawabnya?~~



# Tanggapan terhadap Survei IMI

- Survei dapat memberi gambaran mengenai persepsi pelaku usaha terhadap berbagai hal yang terkait tata kelola.
  - Survei menyajikan beberapa temuan penting tentang potret dan penyebab buruknya tata kelola, dan mempermudah solusi. Temuan pentingnya → buruknya sistem administrasi dan duplikasi/inkonsistensi aturan.
  - Pertanyaan lanjutan → adakah ketimpangan antarwilayah?
  - Survei ini didasarkan pada persepsi yang berpotensi “bias negara” karena subjektivitas pelaku usaha.
  - Meski memotret persoalan cukup jelas, survei ini menyajikan dua fakta yang perlu didalami → sistem hukum yang baik tapi saat bersamaan banyak terjadi disharmoni koordinasi dan kebijakan.
  - Persoalan yang dihadapi sama → persoalan subjek, tentang siapa yang merumuskan kebijakan, menjalankan kebijakan, dan melakukan evaluasi/monitoring.
  - Bagaimana mengurai relasi “power-property”, melalui hubungan saling-untung antara pengusaha dan penguasa?
-



# Sekedar Usulan

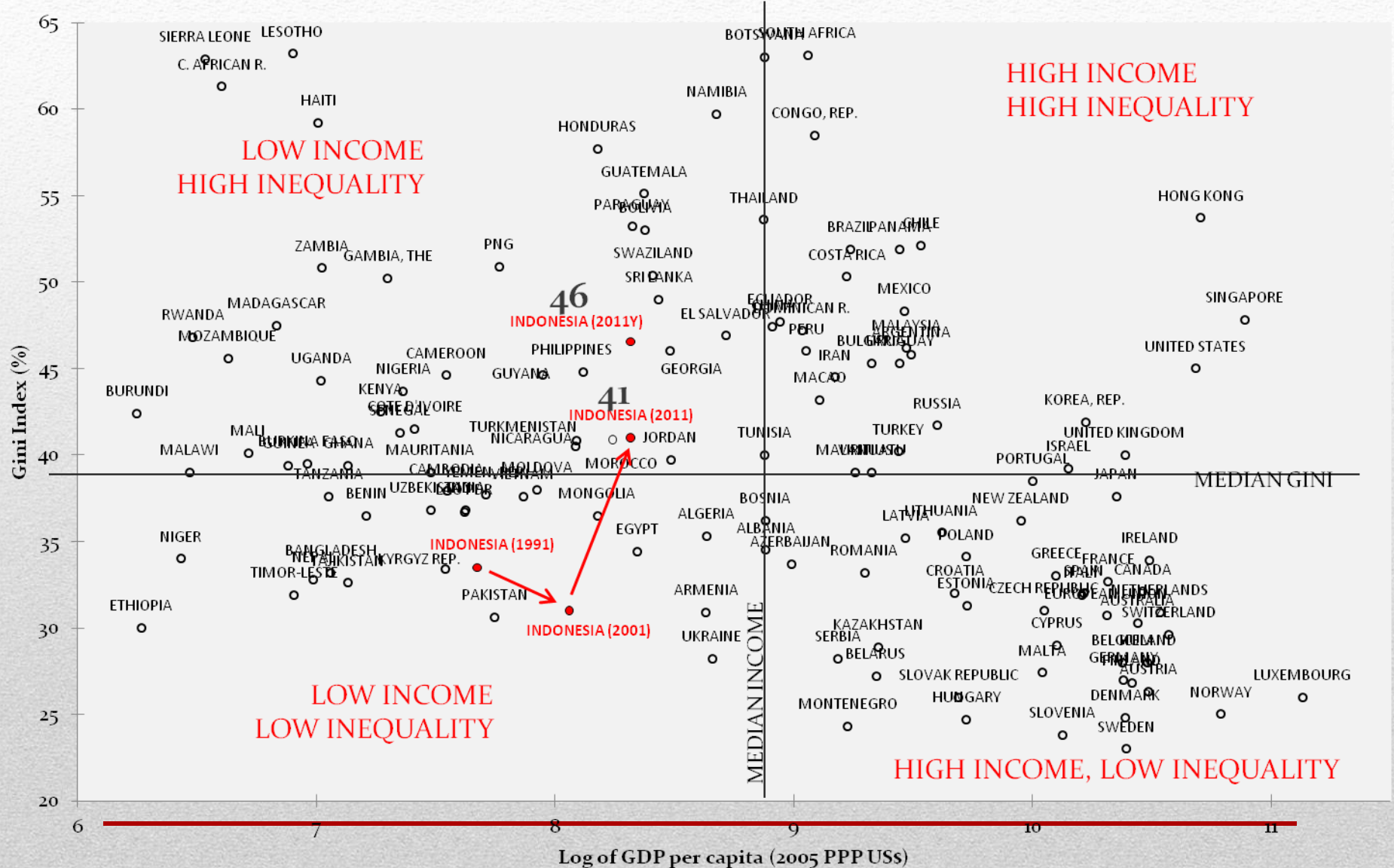
- Mengembalikan “subjek” dalam tata kelola, yaitu pemerkuatan government untuk menjalankan governance.
  - Para pihak yang menjadi aktor/agen dalam bisnis sektor ekstraktif harus tunduk di bawah kontrol demokrasi partisipatif.
  - Penegakan hukum merupakan satu-satunya cara efektif untuk menciptakan kepatuhan dan efek jera.
  - Bagaimana mengkombinasikan perbaikan administratif/tata kelola dengan pengembangan kelembagaan dengan para aktor yang kompeten, berintegritas, dan profesional?
  - Teori Hegemoni → pelayanan publik diimbangi penegak hukum yang kuat.
  - Penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi (menciptakan agen yang baik) dan penghindaran pajak (menciptakan wajib pajak yang baik).
  - Mencari dan merumuskan irisan-irisan → isu beneficial ownership, transfer pricing, illicit financial flow.
  - Studi kasus → desain tax planning perusahaan batubara.
-

# Lampiran

---



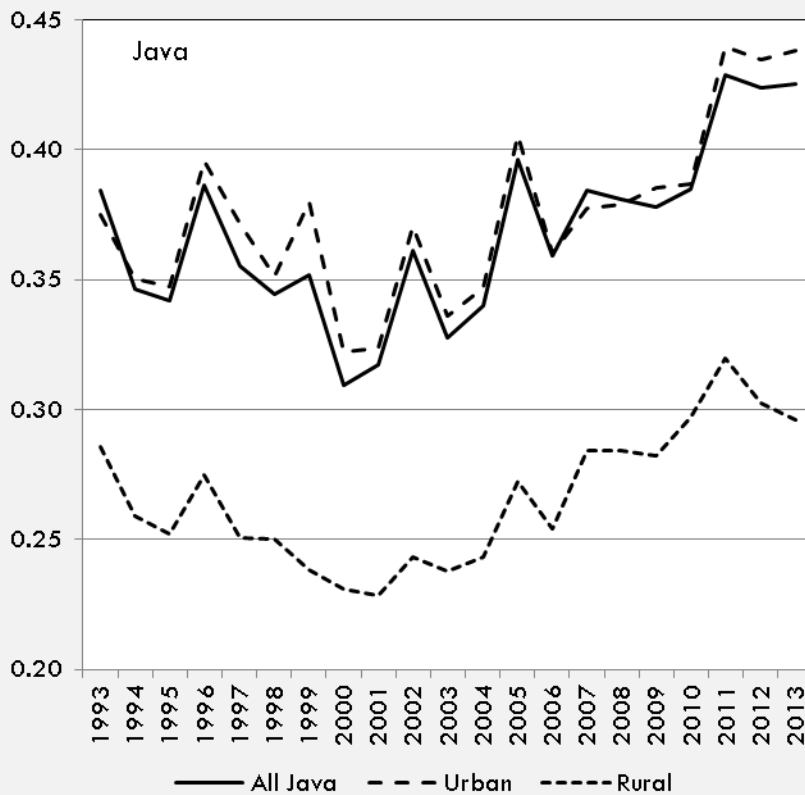
Indonesia can be categorized as a country of high inequality and low income, ..



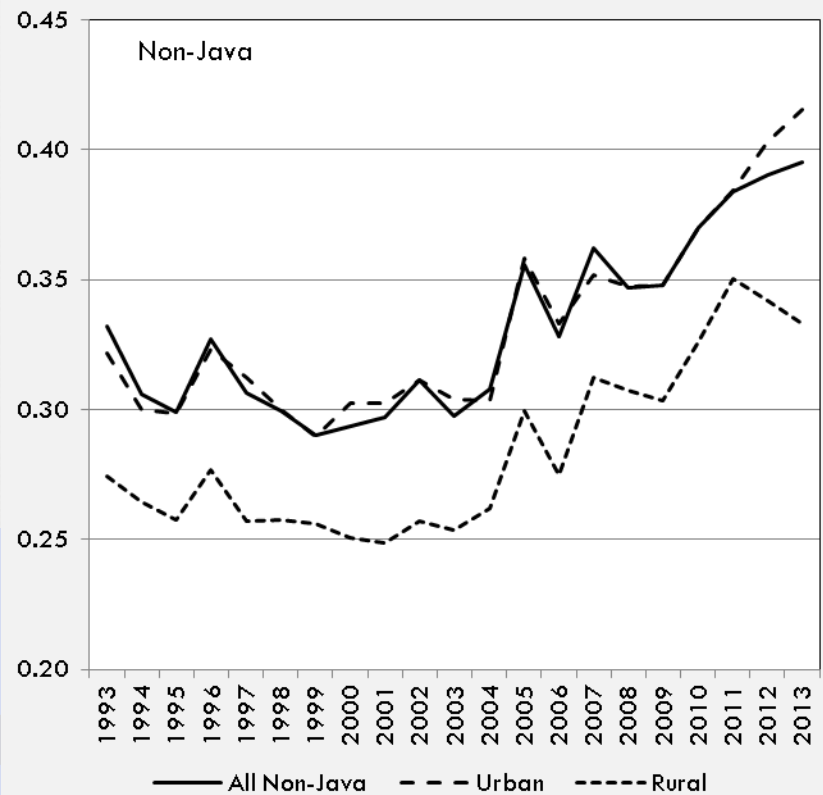
Source: CIA, World Fact Book, 2013, World Bank WDI, and Arief Anshory Yusuf (2014)



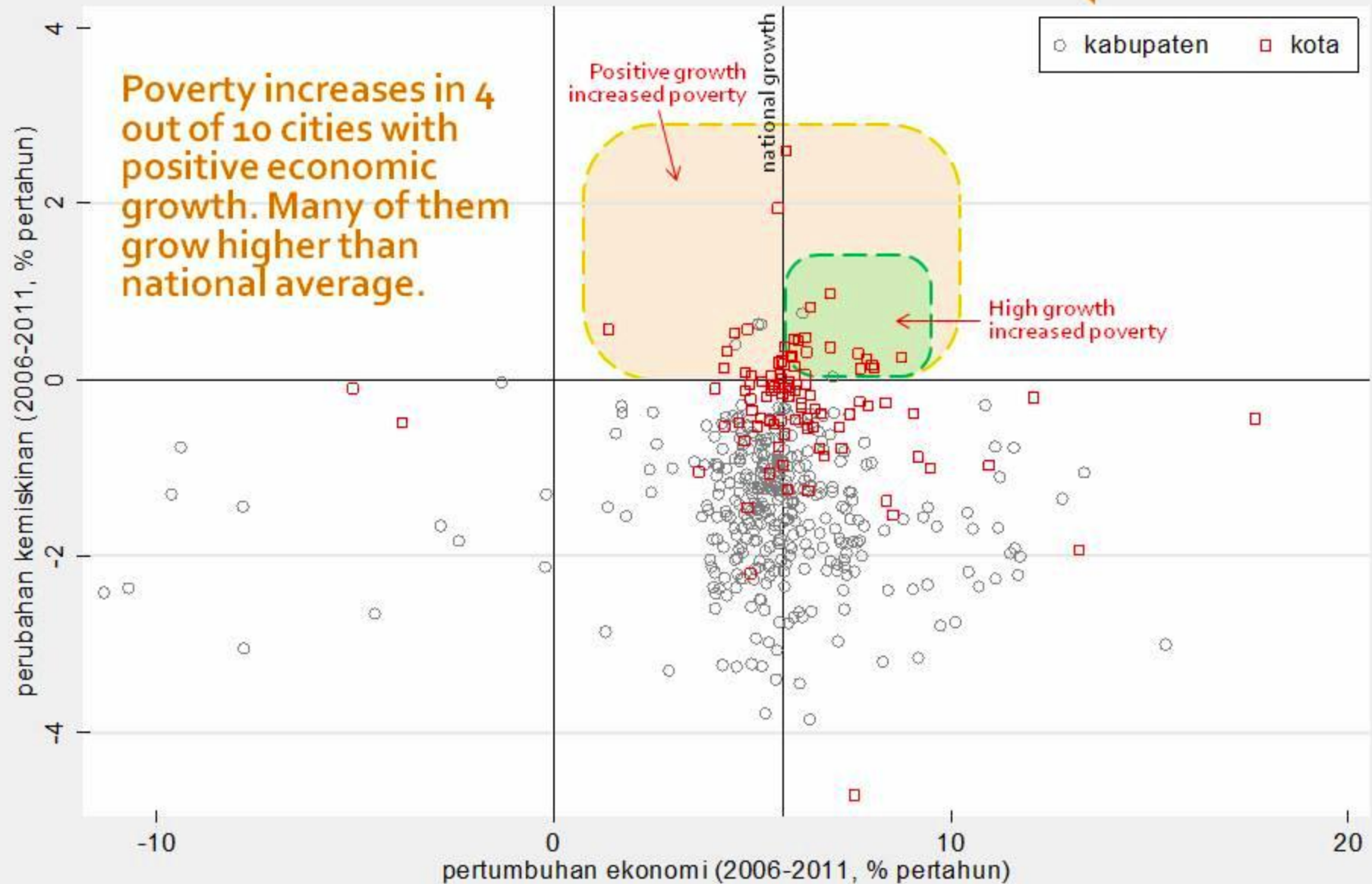
## Gini coefficient in Java



## Gini coefficient in out-of-Java

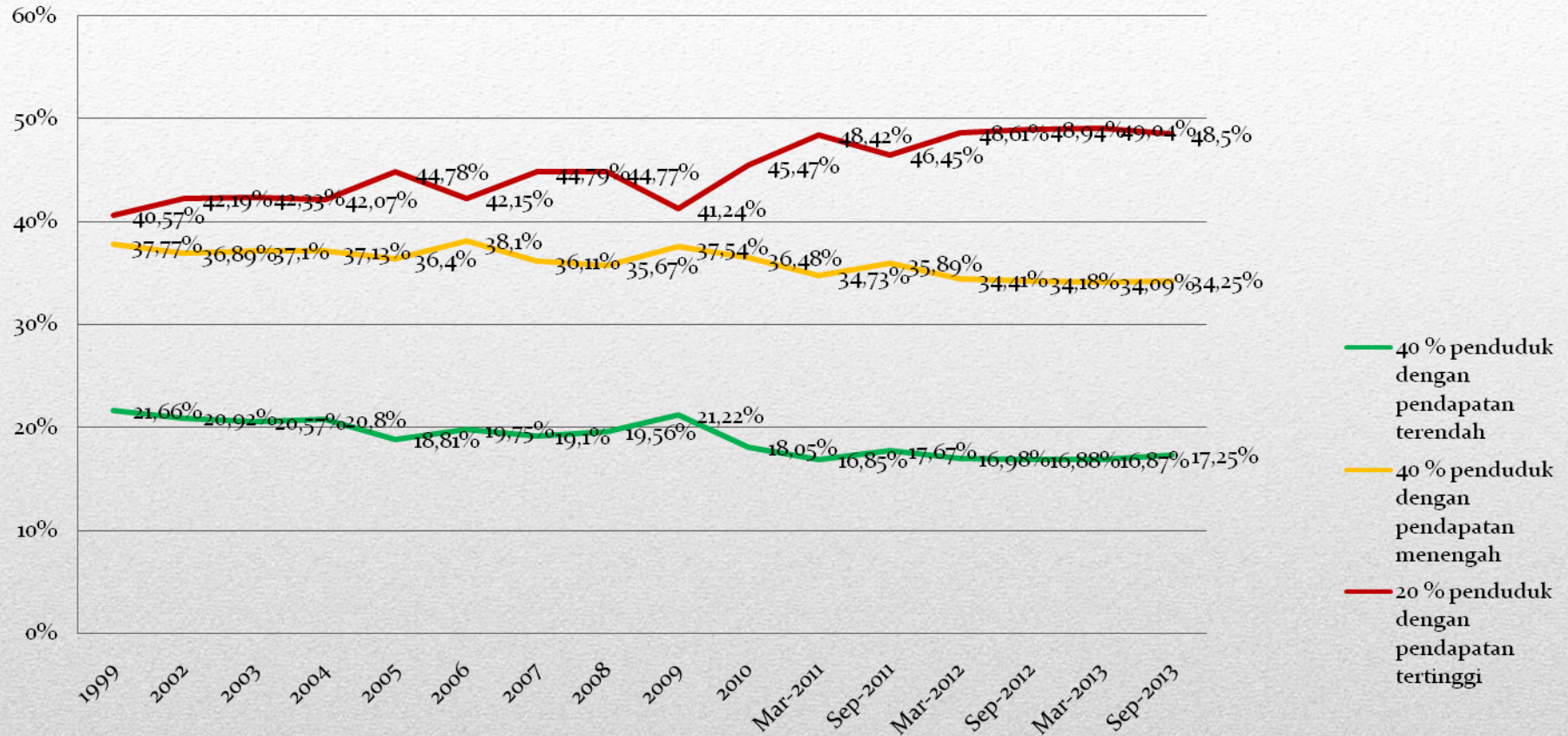


# Indonesian cities in crisis

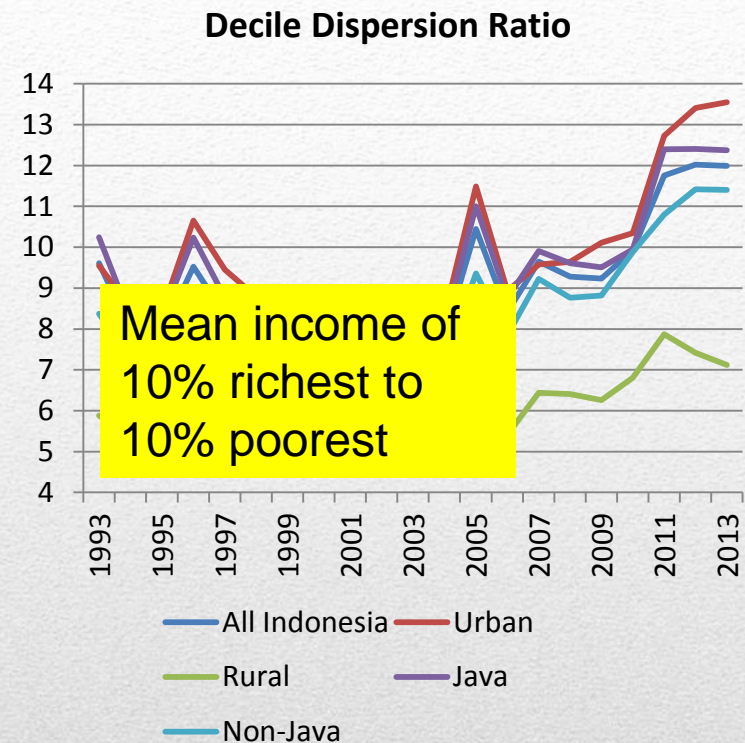
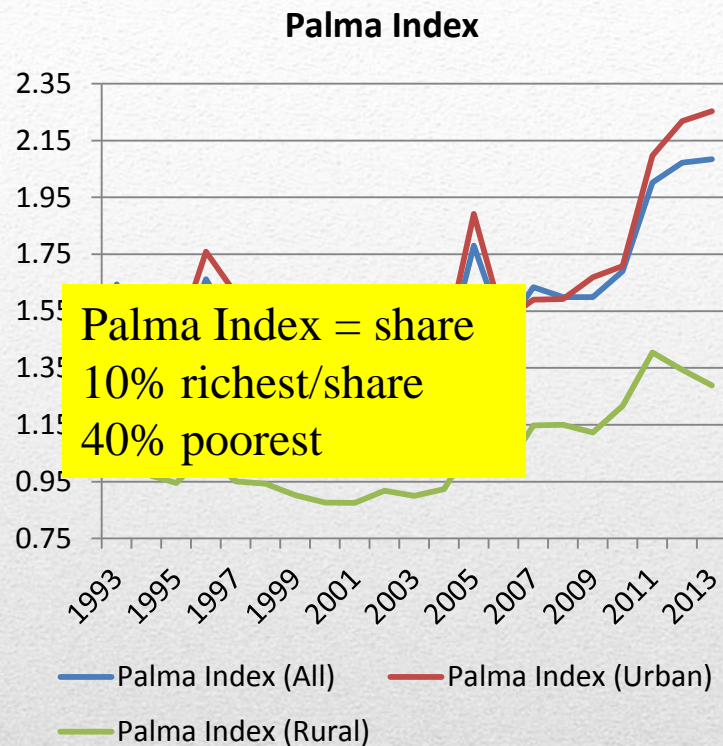




# Distribusi Pendapatan Semakin tidak Merata



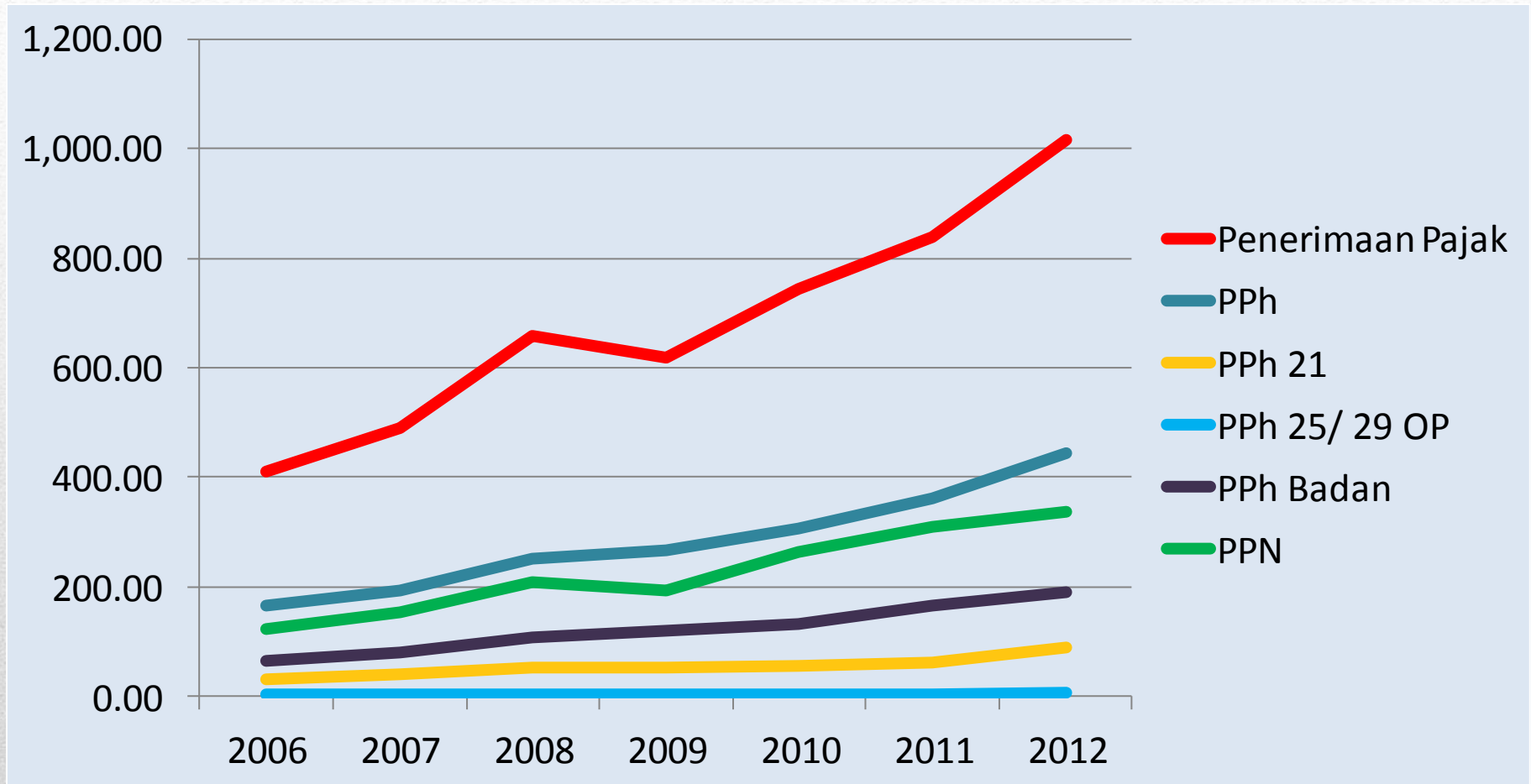
Sejak 2008, trend distribusi pendapatan → 20% penduduk berpendapatan tinggi mengalami kenaikan proporsi pendapatan, sedangkan 40% penduduk berpendapatan menengah cenderung menurun, dan 40% penduduk berpendapatan rendah stagnan.



By other measure, the rise is ~60% (Palma Index or decile dispersion ratio)



# Struktur Penerimaan Pajak 2006-2012



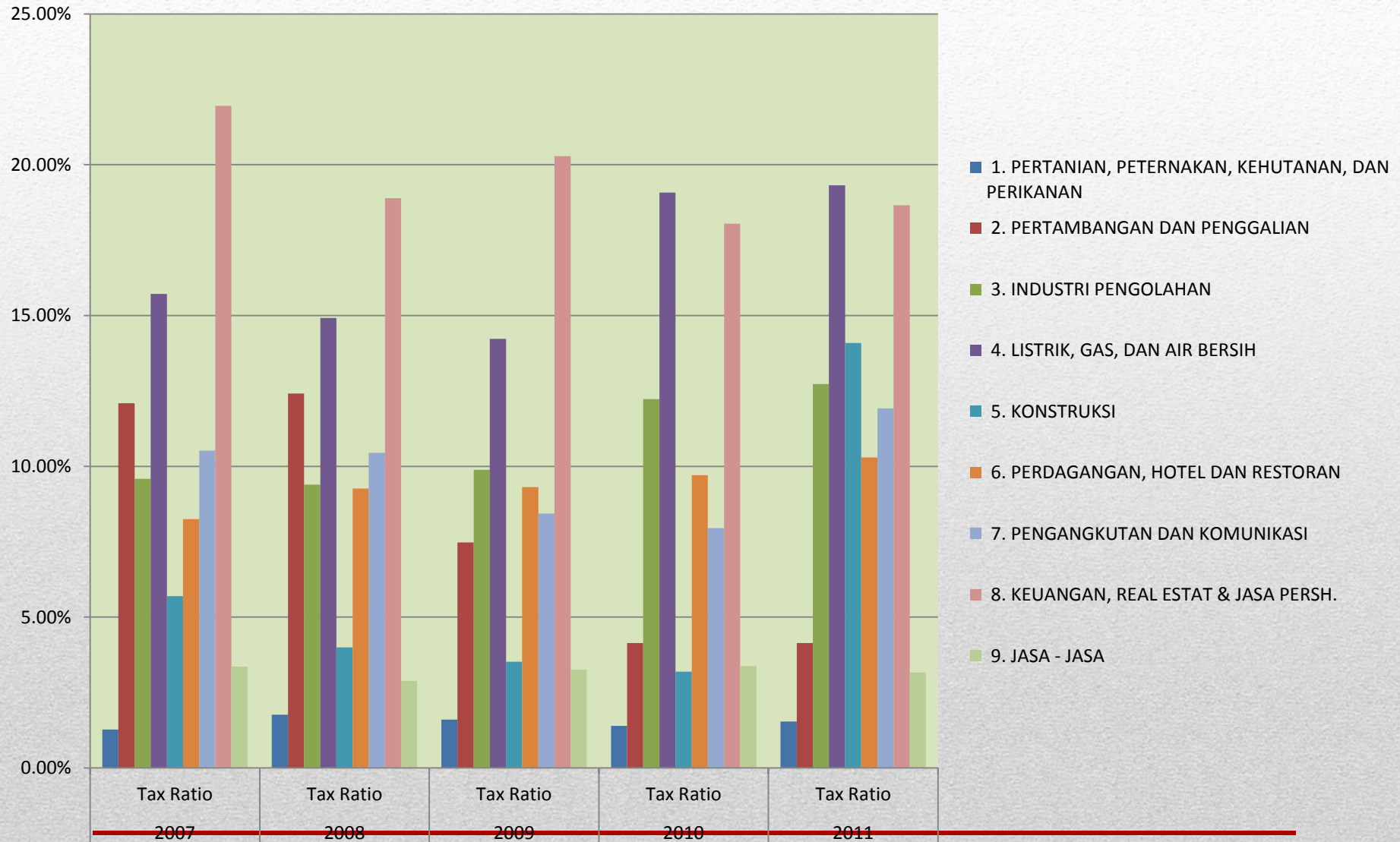
**Tax Injustice** → Penerimaan Pajak masih mengandalkan PPN (indirect tax). PPh Badan stagnan, PPh Pasal 21 meningkat, PPh Orang Pribadi Non-Karyawan stagnan

# Tax Ratio Sektoral 2008-2012

Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2
Pertambangan dan Penggalian	12.6	5.7	8.1	8.1	6.3
Industri Pengolahan	9.7	10.8	11.2	12.5	12.6
Listrik, Gas dan Air Bersih	15.5	14.0	19.1	20.0	13.5
Konstruksi	4.3	3.6	3.5	3.8	3.2
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.7	9.5	9.6	10.4	10.3
Pengangkutan dan Komunikasi	10.6	8.4	7.9	7.5	7.1
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	19.4	19.7	19.8	18.3	18.0
Jasa-jasa	5.4	5.3	4.5	4.5	4.2
TOTAL MENURUT SEKTOR	8.9	7.9	8.1	8.5	8.0




# Tax Ratio Sektoral 2007 – 2011: Where are we?



... setelah pertambahan nilai dari usaha mikro dikeluarkan, beban pajak di sektor konstruksi merupakan yang terendah ...

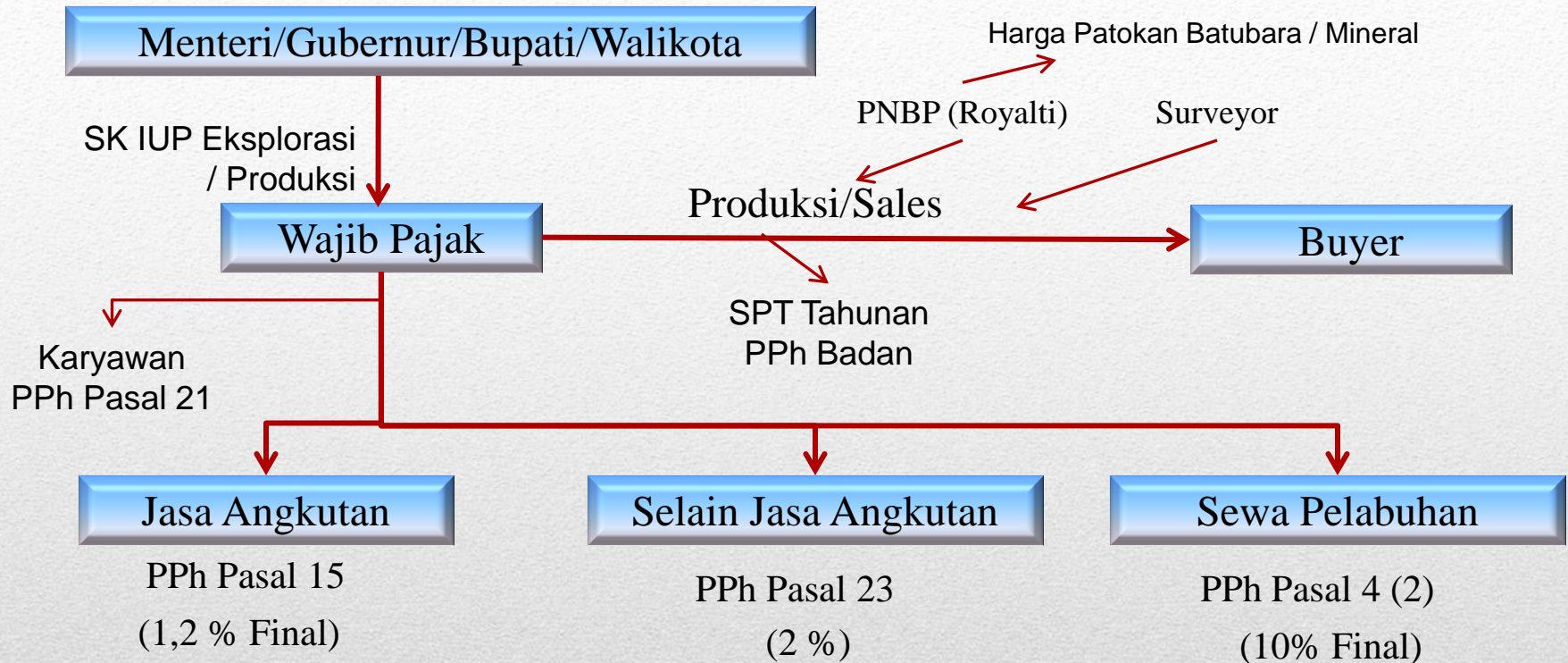
In IDR Millions

	AGRICULTURE, LIVESTOCK, FORESTRY, AND FISHING	 7 April 2014 <b>Saham Konstruksi dan Bank Jadi Jagoan. ...</b> kinerja emiten sektor perbankan, <b>konstruksi dan properti</b> tumbuh paling kencang ...				CONSTR.	TRADE, HOTEL, AND RESTAURANT	TRANSPORT AND COMM.	FINANCE, REAL ESTATE, AND BUSINESS SERVICES	SERVICES
Gross Op. Surplus (GOPS)	605,9					226,568,876	396,715,317	122,416,179	264,819,221	94,630,967
Compensation Emp. (LABR)	184,7					167,855,903	204,970,751	107,177,215	85,309,160	328,035,097
Income Tax on Businesses	8,2					3,684,875	15,855,475	17,203,730	31,358,837	3,805,386
Final Tax									15,744,128	
Income Tax										
TAX/GOPS						1.63%	4.00%	14.05%	11.84%	4.02%
TAX/LABR						0.86%	2.30%	3.59%	14.11%	3.10%
TOTAL		1.16%	7.34%	5.07%	7.24%	1.30%	3.42%	9.17%	12.39%	3.31%
% Micro-Small		87.5%	10.2%	20.8%	1.3%	16.4%	83.9%	30.6%	20.9%	83.5%
TAX/GOPS		10.84%	7.89%	7.85%	10.08%	1.95%	24.82%	20.25%	14.97%	24.37%

Sumber: BPS/Kementrian UMKM dan Koperasi; Estimasi Sugana (2014).



# IMPLEMENTASI PEMAJAKAN



UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba :

Pasal 119 :

IUP dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, apabila Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128 ayat (1) :

Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

## STRUKTUR UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

